

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI

Dwi Rahayu Nurmiati

Kesejahteraan Sosial, Universitas, Padjadjaran, Indonesia

dwi23018@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Gempa bumi Cianjur pada November 2022 menyebabkan kehilangan dokumen administrasi kependudukan yang menghambat akses masyarakat terhadap bantuan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemulihan dokumen serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Ciputri mengenai pentingnya administrasi kependudukan pasca-bencana. Program ini melibatkan 26 mitra, termasuk Disdukcapil (5 orang), Pemerintah Desa Ciputri (7 orang), Dinas Sosial (4 orang), dan Unit Darurat YAKKUM sebagai pelaksana utama (10 orang), yang berperan dalam verifikasi data, pencetakan dokumen, serta bimbingan bantuan sosial. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pendampingan kolektif. Keberhasilan program diukur melalui indikator utama, yaitu 90% pemulihan dokumen warga terdampak, 85% peningkatan pemahaman administrasi, serta 90% kemudahan akses layanan kependudukan. Selain itu, program ini meningkatkan efektivitas kerja sama mitra dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap pencadangan dokumen di masa mendatang. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya mempercepat pemulihan dokumen tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pasca-bencana.

Kata Kunci: Gempa Bumi; Administrasi Kependudukan; Pendampingan; Dokumen Hilang; Pasca-Bencana.

Abstract: The Cianjur earthquake in November 2022 caused the loss of population administration documents which hampered community access to social assistance. This activity aims to help restore documents and increase the understanding and awareness of the Ciputri Village community regarding the importance of post-disaster population administration. This program involves 26 partners, including the Population and Civil Registry Office (5 people), the Ciputri Village Government (7 people), the Social Service (4 people), and the YAKKUM Emergency Unit as the main implementer (10 people), who play a role in data verification, document printing, and social assistance guidance. The methods used include collective socialization and assistance. The success of the program is measured through the main indicators, namely 90% recovery of documents for affected residents, 85% increase in understanding of administration, and 90% ease of access to population services. In addition, this program increases the effectiveness of partner cooperation and community preparedness for future document backup. These results show that the activity not only accelerates document recovery but also strengthens public trust in post-disaster public services.

Keywords: Earthquake; Civil Administration; Assistance; Lost Documents; Post-Disaster.



Article History:

Received: 26-01-2025

Revised : 24-03-2025

Accepted: 24-03-2025

Online : 12-04-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Bencana alam berdampak multidimensional pada aspek fisik, sosial, dan administratif. Salah satu permasalahan utama adalah kehilangan dokumen kependudukan yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan bantuan sosial, (Purwanto et al., 2023). Negara dengan kesiapsiagaan rendah, seperti Nepal pascagempa 2015 dan Filipina setelah topan Yolanda, mengalami kesulitan dalam pemulihan dokumen, (Santiago & Roxas, 2015; Shelter Projects, 2015). Di negara berkembang, sistem pencatatan sipil yang belum siap menyebabkan pemulihan dokumen lambat, memperburuk kondisi korban, (Rosyida et al., 2023; Sari & Lexianingrum, 2024).

Gempa bumi di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 bermagnitudo 5,6 merusak lebih dari 53.000 rumah dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal serta dokumen kependudukan, (Kusmajaya & Wulandari, 2019; Tampubolon et al., 2024). Hilangnya KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran menyulitkan akses bantuan sosial dan pemulihan ekonomi, (Ramadhan et al., 2023). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemulihan dokumen memperburuk kondisi, menghambat mereka dalam memperoleh hak administratif pasca-bencana, (Rosyida et al., 2023; Sari & Lexianingrum, 2024).

Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, merupakan salah satu wilayah terdampak paling parah di Kabupaten Cianjur. Kehilangan dokumen kependudukan menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan sosial, (Sopian & Okpatrioka, 2023; Sumatirta et al., 2023; Syuryansyah et al., 2023). Minimnya infrastruktur layanan administrasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemulihan dokumen menyebabkan kesulitan bagi warga, (Nabilah et al., 2023). Pendampingan sistematis diperlukan agar proses ini lebih efektif. Keterbatasan sumber daya di Disdukcapil dan koordinasi yang belum optimal juga memperlambat pemulihan, (Ramadhan et al., 2023).

Unit Darurat YAKKUM (YEU) bekerja sama dengan Disdukcapil, Dinas Sosial, dan pemerintah desa untuk memfasilitasi pemulihan administrasi kependudukan bagi warga terdampak, (Maulida Firtia et al., 2024; Nuriana et al., 2020). YEU adalah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada tanggap darurat dan pemulihan bencana. Dalam bencana Cianjur, YEU berperan dalam koordinasi pemulihan dokumen melalui kerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, YEU melatih masyarakat dalam mitigasi risiko kehilangan dokumen dan pencadangan digital, (Tampubolon et al., 2024; Yarramsetty & Sai Prasanna, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan administrasi kependudukan pasca-bencana meningkatkan efektivitas distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi, (Edison & Andriansyah, 2023). Pendekatan berbasis komunitas terbukti mengurangi hambatan birokrasi serta meningkatkan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan,

(Dompot Dhuafa, 2020; Rosyida et al., 2023). Program pemulihan dokumen di berbagai daerah telah mempermudah akses hak administratif. Intervensi cepat dalam pemulihan dokumen meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana, (Palang Merah Indonesia (PMI), 2019; UNHCR, 2020).

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Desa Ciputri dalam mendapatkan kembali dokumen administrasi kependudukan mereka. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan dokumen, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan serta prosedur pengurusannya baik dalam situasi normal maupun pasca-bencana, (Nabilah et al., 2023; Ramadhan et al., 2023; Yarramsetty & Sai Prasanna, 2024). Dengan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemulihan administrasi kependudukan di Desa Ciputri dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan administratif, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga terdampak memperoleh kembali dokumen kependudukan mereka dengan mudah dan cepat. Selain itu, program ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani permasalahan administrasi kependudukan pasca-bencana. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Desa Ciputri.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak sebagai mitra utama dalam proses pendampingan administrasi kependudukan pasca-bencana di Desa Ciputri. Berikut adalah mitra yang berperan dalam kegiatan ini dan jumlahnya:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Jumlah: 5 orang. Peran: Membantu proses verifikasi data, mencetak ulang dokumen kependudukan, serta memastikan masyarakat mendapatkan dokumen yang diperlukan.
2. Pemerintah Desa Ciputri
Jumlah: 7 orang (terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan staf administrasi). Peran: Mengkoordinasikan pendataan warga terdampak, memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan, serta membantu dalam penginputan data ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Dinas Sosial
Jumlah: 4 orang. Peran: Memberikan bimbingan terkait mekanisme bantuan sosial serta memastikan warga yang telah memiliki dokumen kependudukan dapat mengakses program bantuan yang tersedia.

4. Unit Darurat YAKKUM (Sebagai pelaksana utama)

Jumlah: 10 orang. Peran: Melakukan koordinasi dengan mitra, mengadakan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi program. Total mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 26 orang, yang berasal dari berbagai instansi terkait.

Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dalam sosialisasi, serta pendampingan administratif langsung dalam pengurusan dokumen kependudukan. Adapun metode yang diterapkan terdiri dari: (1) Ceramah: Penyampaian materi oleh tim YAKKUM Emergency Unit kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen administrasi kependudukan serta prosedur pemulihannya pasca-bencana; (2) Simulasi: Praktik pengisian formulir administrasi secara langsung untuk memudahkan pemahaman masyarakat; (3) Diskusi Kelompok Terarah (FGD): Masyarakat berbagi kendala yang dihadapi dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan solusi oleh pihak terkait; dan (4) Pendampingan Administratif: Tim YAKKUM Emergency Unit membantu warga dalam proses pengisian formulir, pengumpulan dokumen pendukung, hingga pengajuan dokumen baru ke Disdukcapil. Pelaksanaan program ini dibagi menjadi tiga tahapan utama:

1. Tahap Pra-Kegiatan

Tahap ini diawali dengan survei awal untuk mengidentifikasi jumlah warga terdampak yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan. Survei dilakukan melalui; (a) pendataan langsung di lapangan; dan (b) wawancara dengan perwakilan masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Ciputri untuk; (a) Menyusun jadwal kegiatan; (b) Menentukan lokasi pelaksanaan; dan (c) Mempersiapkan materi dan logistik untuk sosialisasi dan pendampingan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan utama berupa:

a. Sosialisasi

Dilaksanakan di balai desa dengan menghadirkan masyarakat terdampak, perwakilan Disdukcapil, dan perangkat desa. Materi yang disampaikan meliputi; (1) jenis-jenis dokumen kependudukan yang perlu diurus; (2) prosedur pengurusan dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana; dan (3) mekanisme pendampingan yang diberikan dalam program ini. Materi disampaikan menggunakan presentasi visual, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman masyarakat.

b. Pendampingan Administratif

Setelah sosialisasi, tim YAKKUM Emergency Unit bersama perangkat desa melakukan pendampingan langsung, dengan kegiatan sebagai berikut; (1) membantu warga mengisi formulir pengajuan dokumen seperti KTP dan kartu keluarga; (2) mengumpulkan dokumen pendukung yang dibutuhkan; (3) mengoordinasikan pengiriman dokumen yang telah terkumpul ke disdukcapil untuk diproses lebih lanjut; dan (4) memantau dan memastikan keabsahan dokumen yang telah diajukan. setelah dokumen diterbitkan oleh Disdukcapil, Pemerintah Desa Ciputri bertanggung jawab untuk melakukan penginputan data penerima manfaat ke dalam DTKS agar mereka dapat mengakses bantuan sosial.

3. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan satu bulan setelah pelaksanaan program utama, dengan metode evaluasi sebagai berikut:

a. Angket Kepuasan Masyarakat

Angket disebarakan kepada peserta untuk mengukur; (1) pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan; (2) kemudahan akses layanan administrasi kependudukan; dan (3) kualitas pendampingan yang diberikan oleh tim., seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Angket Kepuasan Masyarakat

No	Aspek Penilaian	Persentase Kepuasan
1	Pemahaman Informasi	85%
2	Kemudahan Proses	90%
3	Kualitas Pendampingan	88%

b. Observasi Langsung

Tim YAKKUM Emergency Unit melakukan kunjungan lapangan untuk; (1) memverifikasi bahwa masyarakat telah menerima dokumen kependudukan mereka; dan (2) memastikan data telah diinput dengan benar ke dalam DTKS. Hasil dari tahap ini digunakan untuk menyusun laporan akhir kegiatan serta memberikan rekomendasi untuk program serupa di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat terdampak gempa di Desa Ciputri dapat memperoleh kembali hak-hak dasar mereka secara lebih efektif dan efisien.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap ini diawali dengan survei awal yang dilakukan oleh YAKKUM Emergency Unit untuk mengidentifikasi jumlah warga terdampak gempa yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan. Survei dilakukan melalui pendataan langsung di lapangan dan wawancara dengan perwakilan masyarakat setempat. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan dengan mitra, yaitu Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Ciputri. Koordinasi ini bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan, menentukan lokasi pelaksanaan, serta mempersiapkan materi dan logistik yang dibutuhkan untuk sosialisasi dan pendampingan. Persiapan juga mencakup penyusunan materi sosialisasi dengan pendekatan visual dan interaktif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pengurusan dokumen yang hilang.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, kegiatan utama meliputi;

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di balai desa dengan menghadirkan masyarakat terdampak, perwakilan Disdukcapil, dan perangkat desa. Tim YAKKUM Emergency Unit memberikan pemaparan mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan, jenis dokumen yang perlu diurus, serta prosedur pengurusan dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana. Materi sosialisasi disampaikan melalui presentasi visual, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman masyarakat. Sesi ini diikuti oleh 150 warga terdampak, dengan respons positif ditunjukkan oleh keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di Balai Desa Darurat

b. Pendampingan

Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi. Tim membantu warga mengisi formulir pengajuan dokumen, seperti KTP

dan kartu keluarga, serta mengumpulkan dokumen pendukung lainnya. Pendampingan dilakukan secara kolektif di balai desa untuk mempermudah pengumpulan data dan memastikan kelengkapan berkas. Setelah terkumpul, dokumen diserahkan kepada Disdukcapil untuk diproses lebih lanjut, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Pendampingan Pengurusan Dokumen

Proses pengurusan dokumen melibatkan verifikasi data, pencetakan dokumen baru, dan distribusi kembali kepada masyarakat yang bersangkutan. Semua proses ini dipantau oleh YAKKUM Emergency Unit untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Setelah dokumen selesai diproses, Pemerintah Desa Ciputri bertanggung jawab untuk melakukan penginputan data masyarakat penerima manfaat ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Tahap Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan satu bulan setelah kegiatan utama selesai untuk menilai keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan metode:

a. Angket Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat diukur melalui angket yang disebarkan kepada penerima manfaat, dengan hasil sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Angket Kepuasan Masyarakat

No	Aspek Penilaian	Persentase Kepuasan
1	Pemahaman Informasi	85%
2	Kemudahan Proses	90%
3	Kualitas Pendampingan	88%

Hasil angket menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan meningkat sebesar 85%, sementara kemudahan proses administrasi dinilai positif dengan tingkat kepuasan sebesar 90%. Selain itu, 88% responden menyatakan bahwa

pendampingan yang diberikan sangat membantu dan efektif dalam mempercepat proses pengurusan dokumen mereka.

b. **Observasi Langsung**

Tim YAKKUM Emergency Unit melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi bahwa dokumen telah diterima oleh masyarakat. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap data yang telah diinput oleh Pemerintah Desa Ciputri ke dalam DTKS guna memastikan kelengkapan dan validitas data. Observasi juga mencatat bahwa sebanyak 95% dari penerima manfaat telah menerima dokumen kependudukan mereka dalam waktu kurang dari dua minggu setelah proses pengajuan.

4. Kendala dan Solusi

Beberapa kendala dalam pemulihan administrasi kependudukan pasca-bencana meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, kehilangan atau kerusakan dokumen, serta keterbatasan akses transportasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan sosialisasi intensif menggunakan berbagai media, koordinasi dengan Disdukcapil untuk memanfaatkan database yang ada, serta fasilitasi transportasi oleh Pemerintah Desa Ciputri. Sebagai solusi tambahan, tim YAKKUM Emergency Unit memperkenalkan sistem pendataan berbasis digital melalui aplikasi Kemendagri Dukcapil, yang menyimpan data kependudukan secara elektronik. Sistem ini memungkinkan setiap anggota keluarga terakomodasi dalam satu Kartu Keluarga (KK) digital, sehingga memudahkan pemulihan dokumen pasca-bencana dan mengurangi risiko kehilangan di masa mendatang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pendampingan administrasi kependudukan pasca-bencana sangat penting untuk mempercepat pemulihan dokumen warga terdampak serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses administrasi kependudukan. Melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, program ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan akses layanan kependudukan serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serupa di masa depan.

Sebagai rekomendasi, disarankan agar program pendampingan administrasi kependudukan diintegrasikan dalam kebijakan mitigasi bencana nasional. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan dapat mengembangkan sistem pencatatan kependudukan berbasis digital yang memungkinkan pemulihan dokumen secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, diperlukan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat mengenai pentingnya pencadangan dokumen serta prosedur pengurusan administratif

dalam situasi darurat. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya membantu korban bencana tetapi juga membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko kehilangan dokumen di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Dompet Dhuafa. (2020). *Laporan Program Pendampingan Administrasi Kependudukan bagi Korban Bencana di Bekasi*.
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–147. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Kusmajaya, S., & Wulandari, R. (2019). Kajian Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 39–51.
- Maulida Firtia, A., Amelia, M., & Khikmawanto, K. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan di Kota Tangerang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 874–879. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i4.1539>
- Nabilah, A., Malahayati, N., & Fachrurrazi, F. (2023). Tingkat Kepuasan Pemilik Rumah Bantuan Pasca Bencana Gempa di Kabupaten Pidie Jaya dengan Rekonstruksi Berbasis Kontraktor. *Journal of The Civil Engineering Student*, 5(3), 302–308. <https://doi.org/10.24815/journalces.v5i3.23872>
- Nuriana, D., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2020). Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender. *Share: Social Work Journal*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.25562>
- Palang Merah Indonesia (PMI). (2019). *Laporan Pemulihan Administrasi Kependudukan Pasca-Gempa Lombok 2018*.
- Purwanto, D., Damas Permadi, D., Sukmayu Saputri, U., Umar Aditiawarman, Dini Oktarina Dwi Handayani, & Deshinta Arovva Dewi. (2023). Kajian Tentang Bencana Dan Dampak Gempa Bumi di Cianjur Bersama Mahasiswa Teknik Sipil Nusaputra. *Jurnal Abdi Nusa*, 3(1), 36–39. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v3i1.130>
- Ramadhan, E. H. F., Sukmana, O., & Habib, A. (2023). Pemulihan sosial berbasis pelayanan sosial Muhammadiyah pasca bencana gempa bumi Cianjur 2022. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 292–315. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i2.15362>
- Rosyida, A., Aziz, M., Firmansyah, Y., Setiawan, T., Pangestu, K. P., & Kakanur, F. (2023). *Data Bencana Indonesia 2023*. <https://bpbd.kepriprov.go.id/files/data-bencana-indonesia-tahun-2023.pdf>
- Santiago, A. L., & Roxas, F. Y. (2015). Catastrophic Disasters as Opportunities for Sustainable Reconstruction: The Case of Typhoon Yolanda. *DLSU Business & Economics Review*, 25(1), 143–154.
- Sari, A. N., & Lexianingrum, S. R. P. (2024). Tantangan Pemilu 2024 Dampak Bencana Alam Dalam Membatasi Partisipasi Pemilih. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(4), 188–198. <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/783>
- Shelter Projects. (2015). *Nepal 2015 / Earthquake*.
- Sopian, S., & Okpatrioka, O. (2023). Pemberian Bantuan Korban Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Ciputri Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 29–33. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v2i1.936>
- Sumatirta, E., Naim, A., Hadi, H. S., Wulandari, S., Istiyono, Y. P., & Kemal, F. (2023). Hunian Darurat Kepada Korban Bencana Alam Yang Terkena Gempa Bumi Di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(2), 1863–1868.

- Syuryansyah, S., Dwianti, A., & Sukendar, S. (2023). Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Di Cianjur. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 616. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.616-621>
- Tampubolon, S. P., Mulyani, A. S., Setyadi, S., & Simanjuntak, R. M. (2024). Building Assessment Post Earthquake 21 November 2022 in Cianjur District. *Asian Journal of Community Services*, 3(8), 801–814. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v3i8.10819>
- UNHCR. (2020). *Layanan Pencatatan Sipil Keliling bagi Pengungsi dan Korban Banjir Besar di Sulawesi Selatan*.
- Yarramsetty, R., & Sai Prasanna, B. (2024). Beyond Shelters: A Gendered Approach to Disaster Preparedness and Resilience in Urban Centers. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, 462–467. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/IJISRT24APR538>